



Hasmin Joko Ungkap APBD Perubahan Busel Tercepat Sudah Dievaluasi Pemprov Sultra, Anggaran Prioritaskan Energi dan Listrik Kepulauan Untuk Wujudkan Visi Bupati



APBD Perubahan Busel Tercepat Dievaluasi

Sudah disampaikan ke Pemprov Sultra dua pekan sebelum evaluasi, dan evaluasi telah dilaksanakan Rabu. Nini tinggal menunggu SK Gubernur.



Tiga Daerah Lebih Dahulu Dievaluasi

Busel, Buton Tengah dan Wakatobi. Percepatan didukung DPRD dan menjadi pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.



Realisasi APBD 2026 Lampau Target

Didorong belanja pegawai dan barang/jasa. Belanja modal menunggu realisasi pembangunan Kantor Bupati, pencairan tahap pertama Oktober (tanpa uang muka).



Prioritaskan Listrik Wilayah Kepulauan

Dukung visi dan misi Bupati, memastikan masyarakat kepulauan bisa terang 24 jam.



PLTD dan PLTS Sistem Hybrid

Kombinasi diesel dan tenaga surya agar saling menopang. Target beroperasi tahun depan. Lahan PLTS telah diselesaikan.



Tinggal Menunggu SK Gubernur

Setelah SK terbit, program dapat segera dijalankan dan memberi dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Laporan: ARDI, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU POST, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) menyelesaikan tahapan pembahasan dan evaluasi APBD Perubahan 2026 lebih cepat dibanding sejumlah pemerintah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Dokumen tersebut kini berada pada tahap menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra mengenai hasil evaluasi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buton Selatan Hasmin Joko SE MSi mengatakan dokumen APBD Perubahan Busel telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seki-

tar dua pekan sebelum wawancara pada Kamis (1/10/2026). Evaluasi juga telah dilaksanakan pada Rabu, sehingga pemerintah daerah tinggal menunggu penerbitan SK gubernur.

“Posisi per hari ini kami sedang menunggu SK Gubernur terkait hasil evaluasi APBD Perubahan,” kata Hasmin saat diwawancarai, Kamis (1/10/2026). Dalam proses evaluasi tersebut, kata

Hasmin, terdapat tiga pemerintah daerah yang telah masuk lebih dahulu, yakni Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Ia menyebut percepatan Busel tidak terlepas dari dukungan DPRD dalam pembahasan anggaran. Kondisi ini sekaligus menjadi pembelajaran dari pengalaman sebelumnya ketika proses penganggaran Busel sempat mengalami keterlambatan.

Dari sisi pelaksanaan APBD 2026, realisasi anggaran hingga triwulan III telah melampaui target. Komponen yang paling mendorong realisasi berasal dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara belanja modal masih menunggu realisasi pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang memasuki tahap pertama pencairan pada Oktober. Pekerjaan tersebut tidak menggunakan uang muka dan masih memiliki tahapan pen-

Bupati H Muh Adios Apresiasi BKMT Buton Selatan Juara Nasional Ketika Tampil di GBK Jakarta, BKMT Buton Selatan Bawa Nama Baik Daerah



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pangung Tasyakuran Milad ke-45 Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026), menjadi ruang bagi BKMT Kabupaten Buton Se-

latan memperkenalkan potensi daerah melalui penampilan paduan suara. Di hadapan ribuan peserta dari berbagai wilayah Indonesia, rombongan Buton Selatan tampil dengan mengedepankan kekompakan dan nuansa keagamaan. Keikutsertaan terse-

but mendapat apresiasi dari Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios yang hadir mendampingi rombongan bersama Ketua Pembina BKMT Buton Selatan, Hj. Siti Norma Adios. Bagi Adios, penampilan di panggung nasional bukan hanya agenda seremo-

nial, tetapi juga kesempatan menunjukkan bahwa masyarakat Buton Selatan memiliki potensi yang dapat tampil di ruang publik berskala nasional. “Saya sangat bangga dan terharu melihat ibu-ibu BKMT

Lanjut ke Hal: 7

Dua Pemuda Curi Tiga Tabung Gas, Jejaknya Terbongkar Lewat Rekaman CCTV Depot Bang Kumis



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap aksi dua pemuda yang mencuri tiga tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram dari rumah makan

Depot Bang Kumis di Kota Baubau. Polisi kemudian menangkap MR (19) dan AY (23) di sebuah rumah kos di lingkungan Katobengke setelah

Lanjut ke Hal: 7

Kabut Asap Kembali Ganggu Baubau, Konsentrasi PM2.5 Sempat 34,5 µg/m³, Pemkot Baubau Minta Warga Waspada, Pakai Masker, dan Hentikan Bakar lahan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir memengaruhi kualitas udara

dan jarak pandang di wilayah tersebut. Pemerintah juga menegaskan larangan membuka lahan dengan cara membakar serta membakar sampah secara terbuka yang berpotensi memperburuk

Lanjut ke Hal: 7

Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto Dorong Budaya Siaga Bencana di Tengah Ancaman Gempa dan Cuaca



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memperkuat ke-

siapsiagaan bencana. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengumpulkan unsur lintas lembaga dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Antar Lemba-

ga dan Kemitraan Penanggulangan Bencana di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, Jumat (25/9/2026). Kepala BMKG Kota Baubau, Adi Is-

Lanjut ke Hal: 7

RUU Satu Data Indonesia Menuju Paripurna, DPR Siapkan Badan Pengelola Data



Ilustrasi. Suasana di ruang rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Selasa (6/10/2026). Regulasi ini tidak hanya mengatur integrasi dan interoperabilitas data pemerintah, tetapi juga memuat rencana pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) sebagai lembaga yang akan mengoordinasikan ekosistem data nasional.

Pembentukan BSDI menjadi salah satu substansi penting karena selama ini pengelolaan data masih tersebar di kementerian dan lembaga. Badan tersebut dirancang bersifat koordinatif, normatif, dan fasilitatif dengan fungsi sebagai orkestrator bagi pembina data, produsen data, walidata, serta pengguna data.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan mengatakan keberadaan badan khusus diperlukan untuk mengurangi persoalan ego sektoral dalam pengelolaan data pemerintah. Menurut dia, masing-masing kementerian selama ini memiliki data yang dapat berbeda satu sama lain. "Salah satu masalah besar dalam konteks data kali ini kan data itu terlalu banyak ego sektoral. Masing-masing kementerian

punya data," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

RUU tersebut juga menegaskan bahwa integrasi data tidak identik dengan pemusatan seluruh data pemerintah. Prinsip yang digunakan ialah interoperabilitas tanpa sentralisasi. Dengan mekanisme itu, data dapat saling terhubung, sedangkan kepemilikan, penguasaan, pengendalian, dan tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada instansi produsen data.

Daniel menilai penyatuan tata kelola data penting karena kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang dapat dipercaya. "Negara tanpa data enggak ada perencanaan. Perencanaan amburadul, penuh manipulasi, penuh benar enggak benar, kita enggak paham," ujarnya.

Ruang akses publik juga menjadi bagian dari rancangan tersebut. Data dari kementerian dan lembaga pada prinsipnya dapat diakses masyarakat secara terbuka. Namun, informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan serta data yang bersifat rahasia tetap dikecualikan dari akses publik.

Dalam rancangan yang terdiri atas 17 bab dan 138 pasal itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia

dibangun berdasarkan sejumlah asas, antara lain ketaatan, kepatuhan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan dan kerahasiaan, keterandalan, waktu nyata, keadilan sosial, serta kepastian hukum.

Materi lainnya mencakup ekosistem Satu Data Indonesia, data dasar nasional, standar data, metadata, arsitektur sistem, infrastruktur teknis, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Data dasar nasional akan diklasifikasikan sesuai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, dan kepentingan strategis lainnya.

RUU itu juga membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa atau kelurahan dalam memproduksi, mengelola, memperbaiki, menyediakan, dan memanfaatkan data. Pembagian tersebut dilakukan sesuai kewenangan masing-masing tanpa menghilangkan tanggung jawab produsen data.

Secara historis, kebijakan Satu Data Indonesia telah memperoleh pijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan memperbaiki tata kelola data pemerintah agar

data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagikan.

Kebutuhan mengintegrasikan data pemerintah juga berkembang menjadi agenda global seiring transformasi pemerintahan digital. Berbagai negara mengembangkan sistem interoperabilitas agar lembaga pemerintah dapat bertukar dan memanfaatkan data secara lebih efektif.

Namun, tren tersebut sekaligus mendorong perhatian yang lebih besar terhadap keamanan siber, perlindungan informasi rahasia, dan akuntabilitas pengelolaan data.

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia telah memasuki Pembahasan Tingkat I pada Jumat (2/10/2026) dan ditargetkan berlanjut pada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Selasa (6/10/2026). Pembentukan BSDI nantinya diserahkan kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sementara penerapan sistemnya diarahkan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, dan pengambilan kebijakan berbasis data. (*)

Dari PDIP ke Gerindra, Bobby Nasution Pilih Bertahan dan Perkuat Kader



Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam acara Diklat Laskar Partai Gerindra Sumut di Sibolangit, Deliserdang, Sabtu (3/10/2026).

Laporan: Alwan

SIBOLANGIT, BP-Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan tidak akan kembali berpindah partai politik setelah bergabung dengan Partai Gerindra. Di hadapan kader Gerindra Sumatera Utara, Bobby menyatakan ingin menjadikan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu sebagai tempat melanjutkan perjalanan politiknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Partai Gerindra Sumatera Utara di Sibolangit, Deli Serdang, Sabtu (3/10/2026). Selain berbicara mengenai perjalanan politiknya, Bobby meminta kader memperkuat konsolidasi organisasi dan mengawal program pemerintah hingga masyarakat tingkat bawah.

Bobby mengatakan pengalaman berpindah dari partai sebelumnya membuatnya ingin menetapkan pilihan politik. Ia mengaku sempat mengalami kegelisahan setelah diberhentikan dari partai yang sebelumnya menjadi kendaraan politiknya. Namun, menurut dia, Gerindra membuka ruang untuk dirinya.

"Ini adalah jalan saya, yang menurut saya cukup sekali pindah partai. Biarlah saya di Partai Gerindra," kata Bobby.

Sebelum menjadi kader Gerindra, Bobby merupakan kader PDI Perjuangan dan memenangkan pemilihan Wali Kota Medan melalui partai tersebut. Perjalanan itu berubah menjelang Pemilu 2024 ketika Bobby mengambil sikap

politik berbeda dalam Pilpres 2024 dan kemudian diberhentikan dari PDIP. Pada Desember 2024, PDIP mengumumkan pemberhentian 27 kader, termasuk Bobby, Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka.

Bobby kemudian bergabung dengan Gerindra dan pada kesempatan diklat tersebut mengaku seharusnya berada di tengah barisan peserta sebagai kader yang relatif baru, bukan berdiri di podium. Ia juga menilai penerimaan Gerindra memberinya ruang untuk melanjutkan aktivitas politik setelah keluar dari partai sebelumnya.

"Sejujurnya, seharusnya saya bersama-sama berada di barisan kalian. Karena saya juga baru masuk Partai Gerindra," ujar Bobby.

Gerindra sendiri bukan partai yang baru muncul dalam lanskap politik Indonesia. Partai tersebut dideklarasikan pada 6 Februari 2008 dan kemudian mengikuti Pemilu 2009 sebagai salah satu partai politik peserta pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008 dengan Prabowo Subianto sebagai salah satu inisiatornya.

Dalam sejarah perkembangannya, Gerindra menyebut pembentukan partai berlangsung menjelang Pemilu 2009 dan membawa gagasan mengenai masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila. Perjalanan

sejak 2008 hingga menjadi salah satu kekuatan politik nasional menjadi konteks ketika Bobby menyebut Gerindra dibangun melalui proses dan perjuangan kader.

Karena itu, Bobby meminta kader Gerindra Sumut tidak berhenti melakukan konsolidasi. Ia juga mengajak kader ikut memperkuat partai di daerah sekaligus menjaga agar program-program pemerintahan Prabowo dapat diterjemahkan hingga ke tingkat masyarakat.

"Kami dan kita semua, titip saja bukan hanya nama baik partai, tetapi program-program Pak Presiden. Program-program Pak Presiden sangat berdampak kepada masyarakat bawah, yaitu menyejahterakan masyarakat," kata Bobby.

Bobby secara khusus mendorong Gerindra Sumut mempertemukan kepala daerah yang merupakan kader partai secara rutin. Ia mengusulkan pertemuan setidaknya satu kali dalam sebulan agar kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di daerah dapat diselaraskan. Menurut dia, konsolidasi tersebut sekaligus menjadi sarana memastikan program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat.

"Kalau boleh minimal sebulan sekali, ya, Pak Ketua bisa perintahkan kepala daerah, kader-kader, bisa kumpul. Biar program-program Pak Presiden bisa tersampaikan ke bawah dan sukses," ujar Bobby. (*)

Transformasi Digital Perlinsos Sultra Diperkuat, Data Jadi Kunci Ketepatan Bantuan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penguatan layanan tersebut dibahas dalam rapat sosialisasi dan arahan Program Perlindungan Sosial dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Aula Biro Logistik Polda Sultra, Kamis (1/10/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Andi Syahrir mengatakan, transformasi digital harus berorientasi pada kemudahan masyarakat, bukan sekadar penambahan aplikasi atau kanal pelayanan. Teknologi, menurut dia, perlu digunakan untuk memangkas rantai birokrasi dan mendekatkan layanan kepada warga hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Transformasi digital bukan sekadar menambah aplikasi, tetapi memangkas jarak layanan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan, memperbarui data, dan menyampaikan

koreksi,” kata Andi dalam kegiatan tersebut.

Salah satu instrumen yang diperkenalkan ialah Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Agen tersebut berfungsi sebagai loket pelayanan bergerak yang membantu masyarakat memahami kanal dan persyaratan, mendampingi pengisian data, serta mengarahkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Agen juga membantu warga mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang perlu diperbaiki.

Skema pelayanan itu melibatkan jejaring hingga tingkat tapak Polri, melalui *Bhabinkamtibmas*, menjadi salah satu titik temu masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan mengakses kanal digital secara mandiri. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan warga menggunakan perangkat dan layanan daring.

Meski membantu proses akses, Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menentukan penerima manfaat. Sistem yang melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan data pendukung, penilaian

kelayakan, dan penentuan eligibilitas secara objektif. Pemeriksaan antara lain mencakup NIK KTP, nomor meter PLN, serta verifikasi wajah.

“Agen memiliki kewenangan untuk membantu akses, sementara sistem menentukan hasil,” ujar Andi.

Karena itu, agen tidak diperkenankan mengubah hasil verifikasi, menajikan bantuan, ataupun menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan penerima manfaat. Agen juga berkeajiban menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan memastikan pelayanan berlangsung tanpa pungutan.

Alur layanan Perlinsos digital dimulai melalui kanal resmi atau dengan bantuan Agen Perlinsos, dilanjutkan penginputan data dan dokumen pendukung, verifikasi, penilaian kelayakan, hingga penyampaian status kepada masyarakat. Warga juga memiliki ruang untuk melakukan koreksi atau sanggahan melalui kanal resmi dengan proses yang dirancang sederhana, aman, dan dapat dilacak.

Kebijakan berbasis data tersebut berkaitan dengan perkembangan panjang administrasi

perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah sebelumnya menggunakan berbagai basis data sektoral untuk penyaluran program sosial, sebelum kebutuhan integrasi data mendorong *pengembangan DTSEN* sebagai basis data sosial ekonomi yang lebih terpadu. Secara global, pemanfaatan identitas digital, interoperabilitas data, dan layanan publik berbasis teknologi juga berkembang sebagai bagian dari reformasi pelayanan pemerintah pada era digital.

“Ukuran keberhasilan layanan adalah bantuan yang lebih tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat,” kata Andi.

Selain Andi Syahrir, kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Sultra Pariringi yang menyampaikan materi Transformasi Perlindungan Sosial. BPS Sultra Burit Retnowati membawakan materi DTSEN sebagai fondasi kebijakan perlindungan sosial berbasis data, sedangkan Dukcapil Sultra Drs. Muhammad Idris menjelaskan dukungan basis data kependudukan terhadap Program Perlindungan Sosial dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. (*)

Perubahan APBD Sultra 2026 Disepakati, Gubernur Minta Anggaran Berbuah Manfaat



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah pembahasan rampung, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengingatkan seluruh perangkat daerah agar anggaran tidak berhenti sebagai alokasi administratif, tetapi segera diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat.

Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Selasa (29/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi penanda berakhirnya pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Andi meminta kepala perangkat daerah memastikan setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Aspek waktu juga menjadi perhatian agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan dan seluruh target kinerja dapat dicapai.

“Jangan biarkan anggaran berhenti sebagai angka di atas kertas; pastikan dia menjelma menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata,” kata Andi dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, ukuran keberhasilan APBD tidak semata-mata terletak pada besarnya anggaran yang tersedia. Nilai APBD justru ditentukan oleh kualitas perencanaan, tata kelola, efektivitas

pelaksanaan, serta sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Persetujuan bersama itu juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Sultra 2025-2029. Kebijakan daerah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara.

Andi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan. Ia menilai kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting hingga rancangan perubahan anggaran dapat disepakati.

Tahap berikutnya, dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani evaluasi. Pemprov Sultra berharap proses tersebut segera selesai sehingga rancangan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Gubernur juga meminta TAPD dan seluruh perangkat daerah segera menyiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 setelah Perda tentang Perubahan APBD 2026 ditetapkan. Perencanaan lebih awal diperlukan agar kesinambungan program pembangunan tidak terganggu oleh keterlambatan proses penganggaran.

“APBD yang baik dan bernilai adalah APBD yang direncanakan dengan bijak, dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Andi.

Dalam konteks historis, penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan bagian dari perubahan besar sistem pemerintahan Indonesia setelah reformasi 1998. Desentralisasi fiskal yang diperkuat melalui kebijakan otonomi daerah sejak awal 2000-an menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Secara global, prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran juga berkembang menjadi bagian penting tata kelola pemerintahan modern. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kualitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana, tetapi juga kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi layanan dan pembangunan yang terukur. Atas dasar itu, Andi menekankan komunikasi antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah agar berbagai koreksi dan masukan selama pembahasan dapat menjadi bahan perbaikan.

“Kita harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegasnya. (*)

Hadirkan Ulama Yaman dalam Tabligh Akbar, Bupati Azhari Salurkan Rp50 Juta untuk Masjid Nurul Huda di Lolibu



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat melalui dukungan terhadap sarana ibadah dan kegiatan dakwah. Upaya tersebut ditandai dengan penyaluran bantuan Rp50 juta untuk Masjid Nurul Huda di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Minggu (27/9/2026), yang dirangkaikan dengan tabligh akbar menghadirkan ulama asal Yaman, Syaikh Al Jamil Shalih Al Jamili. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik masjid. Menurut dia, Masjid Nurul Huda perlu dikembangkan sebagai ruang pembinaan umat sekaligus tempat masyarakat memperkuat pemahaman dan pen-

galaman nilai-nilai keagamaan. “Dana tersebut diharapkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang operasional dan pengembangan masjid sebagai pusat pembinaan umat,” kata Azhari. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan diterima Anggota DPRD Buton Tengah, La Ode Muslimin, yang mewakili masyarakat setempat. Bantuan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan kegiatan keagamaan di tingkat masyarakat, khususnya dalam penguatan fungsi masjid. Kegiatan di Lolibu tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas ibadah. Tabligh akbar bertajuk “Amalan Sukses Dunia dan Akhirat” memberikan kesempatan kepada warga untuk memperoleh penguatan pemahaman keis-

laman secara langsung dari Syaikh Al Jamil Shalih Al Jamili. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang silaturahmi masyarakat. Secara historis, masjid dalam perkembangan masyarakat Muslim tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, masjid juga menjadi ruang pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, dan pembentukan kehidupan komunitas. Tradisi tersebut kemudian berkembang di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Nusantara, ketika masjid dan surau menjadi pusat pendidikan serta penyebaran pengetahuan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, peran masjid sebagai pusat pendidikan masyarakat juga berkembang seiring masuknya Islam dan tumbuhnya lembaga pen-

didikan keagamaan. Karena itu, penguatan fungsi masjid melalui kegiatan pendidikan dan dakwah dipandang memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembangunan fisik semata. Pemkab Buton Tengah menempatkan penguatan karakter religius sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. “Pembinaan keagamaan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang berkarakter religius,” ujar Azhari. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan. Melalui bantuan sarana ibadah dan kegiatan dakwah, pemerintah daerah berupaya memperkuat pembangunan fasilitas keagamaan dengan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.(*)

Buton Perkuat Tata Ruang Pasarwajo-Lasalimu Selatan Berbasis Data dan Lingkungan

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, mulai memperkuat arah pemanfaatan ruang di Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu Selatan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen tersebut diarahkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen operasional untuk menyelenggarakan pembangunan, investasi, potensi wilayah, dan perlindungan lingkungan. Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Senin (21/9/2026). Kegiatan berlangsung secara luring dan daring dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemkab Buton, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan RDTR juga disandingkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan kebijakan pemanfaatan ruang mempertimbangkan kondisi ekologis. Bupati Buton melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Syamsudin, S.Pd., M.Si., menilai kedua instrumen tersebut penting karena permukiman, infrastruktur, investasi, pertanian, perkebunan, dan pariwisata memiliki kepentingan yang bersinggungan dalam ruang yang sama. “RDTR ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital untuk daerah-daerah, khususnya Kabupaten Buton, dalam rangka mensinergikan tata ruang dan pembangunan di daerah ini,” ujarnya.

Pasarwajo memiliki posisi strategis karena merupakan ibu kota Kabupaten Buton. Kecamatan ini juga memiliki kawasan pesisir, pertanian, dan teluk yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung sektor perikanan. Sementara Lasalimu Selatan memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata pesisir yang membutuhkan arahan pemanfaatan ruang secara terintegrasi. Dalam perspektif pembangunan, kebutuhan penataan ruang bukan persoalan baru. Indonesia mulai memiliki kerangka hukum penataan ruang yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Di tingkat global, gagasan perencanaan kota dan penggunaan lahan berkembang seiring pertumbuhan perkotaan

dan industrialisasi sejak abad ke-19. Perkembangan tersebut kemudian mendorong negara-negara memperkuat perencanaan wilayah agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Konteks tersebut membuat RDTR Pasarwajo dan Lasalimu Selatan tidak hanya berkaitan dengan pembagian fungsi ruang, tetapi juga kepastian pemanfaatan lahan dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buton berharap hasil penyusunan RDTR dan KLHS dapat digunakan sebagai pedoman yang benar-benar diterapkan. “RDTR-nya memastikan arahnya, arah tata ruang ke mana, dan kajian lingkungan hidup strategisnya memastikan bahwa arah itu melindungi kepastian dan keberlanjutan,” kata Bupati. FGD tersebut turut

Tutup Lomba Literasi, Sekda Buton Ingatkan Pelajar Saring Informasi Digital



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mengajak generasi muda memperkuat budaya membaca dan kemampuan menyaring informasi di tengah derasnya perkembangan teknologi. Pesan itu disampaikan saat menutup rangkaian Lomba Bertutur, Lomba Resensi Buku, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan Lomba Video Konten Literasi di Aula Gedung Perpustakaan Buton, Pasarwajo, Selasa (22/9/2026).

Menurut Syamsudin, kemampuan literasi tidak cukup hanya dengan mampu membaca dan menulis, tetapi juga memahami serta menilai informasi secara kritis. Ia mengingatkan peserta agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di ruang digital karena kemajuan teknologi juga diikuti munculnya disinformasi. “Membaca akan menjadi bekal di kemudian hari. Insya Allah literasi kita lebih kuat, diskusi dengan siapa pun kita bisa,” kata Syamsudin.

Ia juga mengingatkan generasi muda, terutama siswa dari Takimpo dan Kombeli, untuk tidak mudah terprovokasi hingga terlibat tawuran. Selain berpotensi menimbulkan cedera, tawuran dapat membawa pelajar berhadapan dengan persoalan hukum dan mengganggu masa depan mereka. Syamsudin mendorong pelajar memperbanyak membaca dan berdiskusi sebagai cara membangun kemampuan berpikir sekaligus memperluas wawasan.

Syamsudin mengapresiasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton yang menyelenggarakan sejumlah perlombaan tersebut sebagai bagian dari upaya menumbuhkan budaya

literasi sejak dini. Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak Mei 2026 dan mendapat antusiasme dari generasi muda di Kabupaten Buton. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan.

Dorongan terhadap budaya membaca tersebut memiliki konteks yang lebih luas. Secara nasional, penguatan budaya baca telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menempatkan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan serta keberdayaan bangsa. Di tingkat global, UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Aksara Internasional sejak 1967 untuk menegaskan pentingnya literasi bagi pembangunan manusia.

Pada penutupan lomba, panitia mengumumkan para pemenang. Juara I Lomba Bertutur Tingkat SD/MI diraih Nur Khalifa Sakhi dari SD Negeri 1 Buton. Juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan diraih Perpustakaan Desa Sigilaende, Desa Laburunci. Untuk Lomba Resensi Buku, juara I tingkat SMP/ sederajat diraih Wa Ode Villy Azka Yoriski dari SMPN 1 Buton, sedangkan tingkat SMA/ sederajat diraih Nadia Herdin dari SMAN 1 Lasalimu Selatan.

Sementara itu, Lomba Video Konten Literasi menempatkan Asrullah sebagai juara I melalui karya berjudul “Bukan Sekadar Tempat Membaca”. Syamsudin menilai capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan literasi dengan memanfaatkan berbagai bentuk media sekaligus mendorong generasi muda menjadi pembaca dan pengolah informasi yang lebih kritis.

“Kita harus menaikkan kelas kita dengan membaca. Kita tidak boleh gagap ilmu pengetahuan, gaptek juga tidak boleh,” ujar Syamsudin.(*)



dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN secara daring bersama jajaran. Tim Supervisi Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Muh. Radinal hadir langsung, bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, kepala OPD Pemprov Sultra secara virtual, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/ BUMD, kepala OPD Pemkab Buton, camat, unsur masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya. Bupati Buton berharap dokumen yang disusun memiliki basis data yang kuat dan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. “Kita berharap bahwa dokumen ini tidak hanya sekadar menjadi dokumen teknis, dokumen administratif, tetapi dokumen ini benar-benar menjadi dokumen yang operasional yang bisa diimplementasikan dalam kebutuhan pembangunan di Kabupaten Buton,” ujarnya. FGD tersebut sekaligus menjadi bagian dari tahapan penyusunan RDTR dan KLHS Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Lasalimu Selatan.(*)

Peradi Profesional-UI Perkuat Pendidikan Calon Advokat, 600 Peserta Ikut PKPA



Ilustrasi. Peradi gandeng kampus UI.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Kebutuhan terhadap advokat yang tidak hanya menguasai hukum secara teoritis, tetapi juga memiliki integritas dan kecakapan beracara mendorong Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Profesional memperkuat pendidikan profesi. Organisasi tersebut menggandeng Universitas Indonesia (UI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diikuti sekitar 600 peserta.

Jumlah peserta tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam penyelenggaraan PKPA. Ketua Umum DPN Peradi Profesional Harris Arthur Hedar mengatakan tingginya partisipasi menunjukkan besarnya minat terhadap profesi advokat. Namun, peningkatan jumlah peserta harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pendidikan.

Menurut Harris, PKPA tidak semestinya diposisikan hanya sebagai tahapan administratif sebelum seseorang memasuki profesi advokat. Pendidikan tersebut harus membentuk kemampuan profesional sekaligus karakter peserta agar mampu men-

jalankan tanggung jawab hukum kepada masyarakat.

“Rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mencari kualitas untuk kebaikan penegakan hukum di negara kita ke depan,” kata Harris dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Peradi Profesional karena itu berencana memperbarui materi PKPA mengikuti perkembangan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan sejumlah regulasi pada 2026 menjadi salah satu pertimbangan perlunya materi pendidikan calon advokat terus disesuaikan. Kualitas pengajar juga akan diperkuat dengan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidang yang diajarkan.

Kerja sama dengan UI menjadi tahap awal dari rencana tersebut. Peradi Profesional menargetkan pengembangan jaringan pendidikan profesi advokat bersama perguruan tinggi di sejumlah kota, antara lain Yogyakarta, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan.

Harris mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan

PKPA. Dalam jangka lebih panjang, kerja sama tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi program profesi advokat yang berada di lingkungan kampus.

“Etika profesi, integritas dan kemampuan mereka beracara,” ujar Harris ketika menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki calon advokat, baik untuk menangani perkara melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan profesi advokat penting untuk mempertemukan fondasi akademik dengan kebutuhan praktik hukum. “Pendidikan profesi advokat membekali peserta dengan pengetahuan hukum, sekaligus membentuk kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional,” kata Heri.

Pendidikan khusus bagi calon advokat memiliki landasan dalam sistem profesi hukum di Indonesia. Setelah reformasi, pengaturan profesi advokat diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menempatkan advokat sebagai

penegak hukum dan mensyaratkan pendidikan khusus profesi sebelum memasuki tahapan profesi berikutnya.

Dalam sejarah hukum internasional, pendidikan dan organisasi profesi advokat juga berkembang seiring pembentukan sistem peradilan modern. Di Inggris, misalnya, tradisi bar dan Inns of Court telah berkembang selama berabad-abad sebagai bagian dari pembentukan kompetensi dan etika profesi hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas advokat sejak lama tidak hanya ditentukan oleh penguasaan norma hukum, tetapi juga pendidikan profesi dan standar etik.

Melalui kolaborasi Peradi Profesional dan UI, pendidikan calon advokat diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktik hukum yang terus berubah. Penguatan kompetensi, integritas, etika, serta kemampuan litigasi dan nonlitigasi menjadi bagian penting agar lulusan PKPA siap menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. (*)

Ci Mehong Laporkan Konten yang Diduga Diubah, Kasus Mengarah ke UU ITE



Ci Mehong melaporkan dugaan pengeditan dan pengunggahan ulang konten digital miliknya tanpa izin.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Konten kreator sekaligus pengusaha kuliner Tjioe Nofia Handayani, atau Ci Mehong, memilih menempuh jalur hukum setelah menemukan materi digital miliknya diubah dan diunggah kembali tanpa izin. Laporan tersebut kini ditangani Polda Metro Jaya dan berpotensi berkembang dari dugaan pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dugaan pencemaran nama baik.

Ci Mehong telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Ditres Siber Polda Metro Jaya pada Jumat (2/10). Pemeriksaan berlangsung sekitar dua setengah jam dengan 26 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait konten yang menjadi pokok laporan.

Kuasa hukum Ci Mehong, Andri Budiman, mengatakan pihaknya tidak lagi mempertimbangkan penyelesaian melalui restorative justice (RJ). Sikap itu diambil setelah upaya penyelesaian secara persuasif dinilai belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas.

“Karena kita sudah mencoba untuk melayangkan empat surat ya. Surat yang pertama adalah klarifikasi, surat yang kedua adalah somasi kesatu, dua, dan juga tiga gitu,” kata Andri di Ditres Siber Polda Metro Jaya, Jumat (2/10).

Persoalan bermula pada 14 Juli 2026 ketika Ci Mehong menemukan kontennya diunggah kembali melalui media sosial. Menurut dia, materi tersebut bukan lagi dalam bentuk aslinya karena telah ditambahkan gambar dan

kata-kata yang sebelumnya tidak terdapat dalam konten miliknya.

Perubahan itu, menurut Ci Mehong, kemudian berdampak terhadap citra dirinya serta kepercayaan publik dan pelanggan terhadap usaha yang dibangunnya. Ia mengaku kerugian yang dirasakan bukan semata-mata berkaitan dengan materi, tetapi juga menyangkut kerugian imateriel.

“Kerugian secara materil terus, tapi sebenarnya lebih ke saya immateril ya, yang tidak bisa kita ceritakan, stres lah sayanya,” ujar Ci Mehong.

Andri mengatakan laporan tersebut saat ini berkaitan dengan Pasal 32 UU ITE mengenai dugaan perubahan atau penambahan materi elektronik tanpa izin. Tim hukum juga tengah mempertimbangkan pengembalian perkara ke Pasal 27 UU ITE terkait dugaan pencemaran nama baik akibat materi yang telah dimodifikasi dan disebarluaskan tersebut.

“Iya, jadi Pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan lewat Pasal 32 ini nanti kita akan masuk ke dalam suatu pengembangan ya, untuk Pasal 27-nya, yaitu pencemaran nama baik,” ujar Andri.

Perkara Ci Mehong memperlihatkan kembali persoalan lama di ruang digital: materi yang telah dipublikasikan dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, lalu disebarluaskan kembali. Di Indonesia, kerangka hukum terkait informasi elektronik mulai menguat sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diberlakukan, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun

2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Secara global, persoalan manipulasi informasi digital juga berkembang seiring masifnya penggunaan media sosial. Teknologi penyuntingan gambar, video, dan audio membuat batas antara materi asli dan materi yang telah dimodifikasi semakin sulit dikenali, sementara penyebarannya dapat berlangsung lintas negara hanya dalam hitungan detik.

Ci Mehong mengatakan dirinya sebenarnya merasa lelah harus berhadapan dengan persoalan hukum di tengah aktivitas mencari nafkah. Namun, ia menilai laporan tersebut perlu dilakukan karena konten yang telah dimodifikasi dinilai telah mengganggu nama baiknya.

“Cuman saya lelah, saya lelah sekali untuk udah sehari-harinya capek ya, capek cari duit ya, cari halal. Nah, cuman kalau ini kan saya harus, harus laporin gitu loh, karena itu udah mencemarkan nama baik saya gitu,” kata Ci Mehong.

Tim hukum Ci Mehong selanjutnya masih menghitung nilai kerugian yang diklaim muncul akibat peredaran konten tersebut, termasuk dampak terhadap akun media sosial dan kerugian imateriel. Perkembangan penyidikan akan menentukan apakah perkara tersebut tetap pada dugaan pelanggaran Pasal 32 UU ITE atau dikembangkan ke dugaan pencemaran nama baik. (*)

Hasmin Joko Ungkap APBD Perubahan Busel Tercepat Sudah Dievaluasi Pemprov Sultra, Anggaran Prioritaskan Energi dan Listrik Kepulauan Untuk Wujudkan Visi Bupati

cairan berikutnya.

Percepatan APBD Perubahan juga diarahkan untuk mendukung visi dan misi Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios. Salah satu perhatian pemerintah daerah ialah penyediaan listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Rencana yang sebelumnya dikaitkan dengan kabel bawah laut kemudian diarahkan pada pengadaan mesin pembangkit yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan program.

“Intinya bagaimana saudara-saudara kita yang

ada di kepulauan itu bisa terang 24 jam,” ujar Hasmin.

Skema penyediaan energi tersebut akan menggabungkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam sistem hybrid. Dengan mekanisme itu, kedua sumber energi diharapkan dapat saling menopang ketika salah satu sumber tidak beroperasi. Pemerintah daerah menargetkan sistem tersebut dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat kepulauan pada tahun depan, semen-

tara lahan untuk pembangunan PLTS disebut telah diselesaikan.

Percepatan siklus penganggaran daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik karena APBD menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Secara historis, praktik penganggaran daerah di Indonesia terus diarahkan agar lebih tepat waktu dan selaras dengan siklus APBN serta perencanaan pembangunan. Dalam konteks Busel, Hasmin Joko mengatakan pemerintah daerah kini menunggu SK Gubernur dan berharap tahapan APBD Perubahan 2026 dapat segera dituntaskan tanpa kendala. (*)

Bupati H Muh Adios Apresiasi BKMT Buton Selatan Juara Nasional Ketika Tampil di GBK Jakarta, BKMT Buton Selatan Bawa Nama Baik Daerah

Selatan tampil di panggung Gelora Bung Karno. Ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan bukti nyata bahwa potensi, bakat, dan semangat masyarakat kita tidak kalah dengan daerah mana pun,” kata Adios.

Menurut Adios, kehadiran BKMT Buton Selatan di Jakarta sekaligus membawa nama daerah ke tengah komunitas BKMT dari berbagai penjuru Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, kata dia, akan terus mendukung aktivitas BKMT dalam membina keluarga, mempererat persaudaraan, serta menggerakkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Ketua Pembina BKMT Buton Selatan Hj. Siti Norma Adios mengatakan kesempatan tampil di GBK menjadi kebanggaan bagi seluruh rombongan. Ia memandang kehadiran mereka

di Jakarta sebagai bagian dari upaya membawa semangat persaudaraan dan pengabdian masyarakat Buton Selatan ke tingkat yang lebih luas. “Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa semangat persaudaraan, keagamaan, dan pengabdian yang tumbuh di kampung halaman mampu menjangkau hingga ke ibu kota,” ujarnya.

Milad ke-45 tersebut juga memiliki konteks historis bagi organisasi. BKMT secara nasional lahir pada 1 Januari 1981 di Pesantren Putri As-Syafi’iyah, Jakarta, atas prakarsa Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah. Sejumlah sumber sejarah BKMT mencatat pertemuan pembentukan organisasi itu dihadiri sekitar 1.500 orang yang mewakili ratusan majelis taklim dari Jakarta dan sekitarnya. Sejak itu, BKMT berkembang men-

jadi wadah komunikasi, pembinaan, pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Empat puluh lima tahun kemudian, panggung GBK kembali menjadi bagian dari perjalanan sejarah BKMT. Bagi rombongan Buton Selatan, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa aktivitas majelis taklim tidak berhenti pada kegiatan pengajian, tetapi juga dapat berkembang melalui seni, kebersamaan, pendidikan, dan pengabdian sosial. “Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi. Buton Selatan bangga pada kalian,” ujar Adios.

Perjalanan BKMT dari forum yang dibentuk di Jakarta pada 1981 hingga berkembang di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan perubahan skala gerakan majelis taklim dalam rentang lebih dari empat dekade. Penampilan BKMT Buton Selatan pada Milad ke-45 menjadi bagian dari perjalanan tersebut sekaligus membawa pesan bahwa potensi masyarakat daerah dapat hadir dan dikenal dalam ruang kebangsaan. (*)

Dua Pemuda Curi Tiga Tabung Gas, Jejaknya Terbongkar Lewat Rekaman CCTV Depot Bang Kumis

melakukan penelusuran berdasarkan laporan pemilik usaha.

Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Baubau, Ipda Fatih Safran, S.Tr.K., mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan polisi Nomor: P/B/160/X/2026/SPKT/POLRES BAU-BAU/POLDA SULAWESI TENGGARA. Penyidik mencocokkan rekaman CCTV dengan hasil penyelidikan hingga mengidentifikasi kedua pemuda tersebut sebagai pelaku.

Aksi pencurian terjadi pada Selasa, 22 Februari 2026. Saat itu, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride dan melintas di lorong depan SMPN 2 Baubau. Salah satu pelaku melihat pintu belakang rumah makan dalam keadaan tidak terkunci. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk masuk dan mengambil tiga tabung gas sebelum dibawa pergi menggunakan sepeda motor.

“Dari hasil penelusuran CCTV, Satreskrim Polres Baubau berhasil mengidentifikasi pelaku dan langsung melakukan penangkapan,” kata Fatih dalam konferensi

pers, Kamis (1/10/2026).

Setelah pencurian, ketiga tabung gas sempat ditiptipkan di rumah kerabat pelaku di Wameo. Barang tersebut kemudian dijual kepada sebuah toko di wilayah Palatiga dengan harga Rp400 ribu per tabung. Total hasil penjualan mencapai Rp1,2 juta dan dibagi dua sehingga masing-masing pelaku memperoleh Rp600 ribu. Polisi menyebut motif pencurian berkaitan dengan kebutuhan uang untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

“Motifnya, pelaku membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Dari hasil penjualan tabung, keseluruhan dibagi dua dan masing-masing mendapatkan Rp600.000,” ujar Fatih.

Kasus itu sempat viral di salah satu platform media sosial di Kota Baubau karena aksi pencurian terekam kamera. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan informasi bahwa pelaku diduga kerap menjalankan aksinya di sekitar kawasan Jembatan Batu. Salah satu tersangka juga diketahui pernah terlibat kasus kepemilikan senjata tajam ketika masih di bawah umur.

Kedua tersangka kini dijerat Pasal 477 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun. Kasie Humas Polres Baubau, Iptu Rino Asnan, mengimbau pemilik rumah makan dan pelaku usaha meningkatkan keamanan karena tempat usaha menjadi salah satu lokasi yang rentan menjadi sasaran pencurian.

Secara historis, pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang telah dikenal sejak masa awal pembentukan sistem hukum pidana modern. Di Indonesia, pengaturan mengenai pencurian sebelumnya terdapat dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda, khususnya Pasal 362 dan pasal-pasal terkait. Seiring pembaruan hukum pidana nasional, Indonesia mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional.

Dalam konteks global, perkembangan teknologi pengawasan seperti CCTV telah mengubah metode pengungkapan kejahatan konvensional. Rekaman kamera tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan, tetapi juga dapat menjadi petunjuk penting dalam mengidentifikasi pelaku dan merekonstruksi peristiwa pidana. Perkembangan ini sejalan dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum di berbagai negara. (*)

Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto Dorong Budaya Siaga Bencana di Tengah Ancaman Gempa dan Cuaca

tiono, mengatakan karakter geologi Pulau Buton dengan keberadaan struktur sesar aktif membuat potensi gempa dan tsunami harus diantisipasi secara terus-menerus. Menurut dia, kesiapsiagaan masyarakat menjadi penting karena waktu terjadinya gempa tidak dapat diketahui secara pasti.

“Gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan tepatnya datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan serta pemahaman tanda-tanda dan cara menyelamatkan diri adalah hal yang paling penting kita miliki,” kata Adi Istiono dalam rakor tersebut.

Kewaspadaan tidak hanya diarahkan pada gempa dan tsunami. Peralihan musim berpotensi memicu angin kencang, puting beliung, petir, dan gelombang laut tinggi. Saat memasuki musim hujan, risiko banjir, tanah longsor, dan banjir bandang ikut meningkat, sedangkan kondisi iklim 2026 juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Penguatan mitigasi tersebut berlangsung dalam forum bertema “Memperkuat Sinergi, Membangun Kolaborasi, dan Mewujudkan Buton Selatan yang Tangguh Bencana”. Forum melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Kepala BPBD, kepala organisasi perangkat daerah, jajaran TNI/

Polri, serta perwakilan Basarnas Kota Baubau untuk menyatukan langkah penanganan sebelum, saat, dan setelah bencana.

Secara historis, ancaman gempa dan tsunami di Indonesia telah berulang kali menimbulkan korban serta kerusakan besar. Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, yang dipicu gempa berkekuatan sekitar M9,1-9,3 di lepas pantai Sumatra, menjadi salah satu bencana tsunami paling mematikan dalam sejarah modern. Pengalaman tersebut kemudian memperkuat perhatian nasional terhadap sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, dan kesiapan masyarakat di wilayah pesisir.

Karena risiko bencana bersifat lintas sektor, rakor menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga teknis, aparat keamanan, Basarnas, dan masyarakat. Pemkab Buton Selatan juga mendorong warga memantau informasi resmi BMKG melalui kanal dan aplikasi Info BMKG yang menyediakan prakiraan cuaca, informasi iklim, gempa bumi, serta peringatan dini maritim.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Buton Selatan berupaya membangun budaya kesiapsiagaan sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Pendekatan itu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi saat bencana terjadi, tetapi juga sebagai unsur penting dalam mengenali risiko, memahami jalur penyelamatan, dan mengambil tindakan cepat ketika peringatan dini dikeluarkan. (*)

Kabut Asap Kembali Ganggu Baubau, Konsentrasi PM2.5 Sempat 34,5 µg/m³, Pemkot Baubau Minta Warga Waspada, Pakai Masker, dan Hentikan Bakar lahan

polusi udara.

Imbauan itu disampaikan setelah pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari menunjukkan konsentrasi partikulat PM_{2.5} di Baubau sempat mencapai 34,5 mikrogram per meter kubik (µg/m³) pada 29 September 2026. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 10,9 µg/m³ pada Sabtu (3/10/2026) siang seiring embusan angin dari selatan yang membantu mengurai polutan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan analisis BMKG menunjukkan kabut asap tersebut berkaitan dengan pergerakan asap dari arah timur akibat pembakaran atau kebakaran. Karena itu, penurunan konsentrasi partikulat belum berarti risiko telah sepenuhnya berakhir.

“Potensi kenaikan kabut asap masih terbuka apabila titik api di wilayah asal tetap aktif dan arah angin kembali bergerak dari timur,” kata Andi dalam siaran pers, Sabtu (3/10/2026).

Pemkot Baubau meminta Satgas Penanganan Dampak El Nino dan jajaran pemerintah daerah, termasuk BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, camat, serta lurah, memperkuat pemantauan kondisi lapangan. Aparat pemerintah juga diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai langkah pencegahan dan perlindungan diri selama kualitas udara belum sepenuhnya stabil.

Kelompok yang lebih rentan terhadap paparan partikulat, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita infeksi saluran pernapasan akut dan asma, diminta mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Masyarakat secara umum dianjurkan menggunakan masker ketika kabut asap menebal dan menutup ventilasi rumah saat konsentrasi partikulat meningkat.

Pemkot juga mengingatkan

pengendara kendaraan bermotor, nelayan, dan operator transportasi laut agar memperhitungkan kemungkinan perubahan jarak pandang secara memadai. Langkah tersebut diperlukan karena kabut asap tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan dalam perjalanan.

Larangan pembakaran terbuka menjadi perhatian penting karena kebakaran vegetasi dan lahan merupakan salah satu sumber partikulat udara. Di Indonesia, persoalan kabut asap lintas wilayah pernah mencapai skala besar, terutama pada kebakaran hutan dan lahan 1997-1998 yang menghasilkan asap pekat di sejumlah wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu episode penting dalam sejarah penanganan kebakaran hutan dan polusi udara regional.

Secara internasional, persoalan serupa juga berulang di sejumlah kawasan yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap dari kebakaran besar dapat bergerak mengikuti pola angin dan memengaruhi wilayah yang jauh dari sumber api. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di suatu wilayah tidak selalu hanya dipengaruhi oleh sumber pencemar yang berada di dalam wilayah administratifnya.

Andi mengatakan Pemkot Baubau akan mempertahankan koordinasi dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari untuk memperbarui informasi mengenai sebaran aerosol dan konsentrasi partikulat. Pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah kewaspadaan berikutnya.

“Masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu liar, serta memantau kanal informasi resmi Pemkot Baubau maupun BMKG, ujar Andi.

Hingga Sabtu (3/10/2026), konsentrasi PM_{2.5} di Baubau menunjukkan tren penurunan dibandingkan kondisi pada 29 September. Namun, pemerintah tetap meminta masyarakat menghindari aktivitas yang dapat menghasilkan asap serta mengikuti perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca melalui sumber informasi resmi. (*)

21 Agenda DPRD Baubau Ditetapkan, Bahas APBD 2027 hingga Serap Aspirasi Warga



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pembahasan anggaran daerah untuk 2027 menjadi salah satu agenda utama DPRD Kota Baubau dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027. Selain APBD, DPRD akan menjalankan agenda legislasi, pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga peningkatan kapasitas anggota dewan.

Keseluruhan agenda tersebut masuk dalam 21 materi pokok kegiatan yang telah ditetapkan DPRD Kota Baubau untuk periode Oktober 2026 hingga Januari 2027. Penetapan itu dituangkan melalui Keputusan DPRD Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, Adriansyah Kfarmin, pada Kamis (1/10/2026).

Plt. Sekretaris DPRD Kota Baubau, Drs. Arif Basari, M.Si., membacakan materi pokok kegiatan tersebut dalam agenda DPRD. Adapun waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD bersama Badan Musyawarah (Bamus).

Dalam bidang anggaran, DPRD menjadwalkan pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

"Materi pokok kegiatan ini menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan agenda selama Masa Sidang I," kata Arif Basari.

Pada fungsi legislasi, DPRD akan membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk keputusan yang berkaitan dengan Wali Kota dan DPRD. Dewan juga akan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta melakukan sosialisasi terhadap Ranperda.

Fungsi pengawasan akan dijalankan melalui rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), konsultasi, serta pembentukan panitia khusus (Pansus). Mekanisme tersebut menjadi bagian dari kerja kelembagaan DPRD dalam memperoleh informasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan daerah.

Di luar ruang sidang, DPRD akan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspi-

rasi masyarakat. Dewan juga membuka ruang penerimaan pengaduan warga sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi masyarakat.

Agenda lainnya meliputi kunjungan kerja ke kecamatan dan kelurahan, koordinasi dengan pemerintah daerah lain maupun pemerintah pusat, serta studi banding. DPRD juga memasukkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota dewan dan partisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Baubau.

Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa kerja DPRD tidak hanya berpusat pada pembentukan peraturan dan pembahasan anggaran, tetapi juga mencakup fungsi representasi dan pengawasan. Secara konstitusional, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah dan memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran, serta pengawasan.

Secara historis, penguatan peran lembaga perwakilan daerah di Indonesia berlangsung setelah perubahan politik pada era Reformasi 1998. Perubahan tersebut kemudian diikuti penguatan kerangka pemerintahan daerah melalui

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memperluas peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi itu selanjutnya mengalami beberapa perubahan hingga kerangka hukum pemerintahan daerah saat ini.

Dalam konteks internasional, lembaga legislatif juga secara umum menjalankan fungsi pembuatan hukum, pengawasan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, meskipun bentuk dan kewenangannya berbeda di setiap negara. Karena itu, agenda DPRD Kota Baubau untuk Masa Sidang I 2026-2027 mencakup siklus kerja yang menghubungkan pembentukan kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Pelaksanaan teknis dari seluruh agenda akan disesuaikan melalui pembahasannya pimpinan DPRD bersama Bamus," ujar Arif. Dengan ditetapkannya 21 materi pokok tersebut, DPRD Kota Baubau memiliki kerangka kerja selama empat bulan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hingga memasuki Masa Sidang II. (*)

Turnamen Domino Gardu Wajo Meriahkan Hari Jadi Kota Baubau ke-25, Target Diramaikan 256 Pasang di Kotamara



Azlim, Penyelenggara Tounament

Pewarta: Firman

BAUBAU, BP- Sebanyak 256 pasangan atau sedikitnya 512 peserta ditargetkan ambil bagian dalam Turnamen Domino Tahun 2026 yang digelar Gardu Komunitas Wajo Kota Baubau. Ajang tersebut akan berlangsung pada 10-11 Oktober 2026 di kawasan Baruga Kotamara dan menjadi bagian dari semarak Hari Jadi Kota Baubau sebagai daerah otonom.

Ketua Panitia Turnamen Domino 2026, Bung Azlim, mengatakan persiapan teknis terus dilakukan untuk menyambut tingginya minat masyarakat. Lokasi pertandingan dipusatkan di Baruga Kotamara sesuai arahan Sekretaris Daerah Kota Baubau.

"Sesuai arahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Baubau, venue pertandingan dipusatkan di area Baruga Kotamara. Target peserta minimal 256 pasang," kata Azlim dalam keterangan penyelenggara, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Azlim, panitia masih mematangkan berbagai kebutuhan pertandingan. Dukungan masyarakat juga diharapkan agar kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat berjalan tertib dan sukses.

Ketua Gardu Komunitas Wajo Kota Baubau, Rahmat Safi, mengatakan turnamen itu tidak semata dirancang sebagai kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk syukur atas perjalanan Kota Baubau sejak dimekarkan menjadi daerah otonom pada 2001 sekaligus ruang memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat.

"Harapannya,

semarak Hari Jadi Kota Baubau makin meriah dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Baubau merupakan bagian dari semangat 'Kerja Bersama' yang diusung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Ir. Wa Ode Ham-sinah Bolu, M.Sc. Gardu Komunitas Wajo, kata dia, ingin mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan melalui aktivitas sosial kemasyarakatan.

Turnamen tersebut juga berlangsung ketika permainan domino mengalami perubahan posisi dalam lanskap olahraga. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolah-ragaan membagi olahraga nasional ke dalam olahraga pendidikan, olahraga masyarakat atau rekreasi, dan olahraga prestasi. Domino yang selama ini populer sebagai permainan rekreatif kini berkembang ke ranah kompetisi melalui organisasi seperti Olahraga Domino Indonesia (ORADO) dan Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

Secara historis, domino telah dikenal luas dalam berbagai masyarakat dunia selama berabad-abad. Permainan dengan keping bertanda titik ini umumnya ditelusuri ke China pada abad ke-13, sebelum berkembang ke Eropa dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Di Indonesia, domino dan variasinya kemudian menjadi bagian dari permainan sosial masyarakat sekaligus

berkembang menjadi aktivitas kompetitif.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perubahan fungsi permainan tradisional dan rekreatif menjadi kegiatan yang memiliki unsur keterampilan, strategi, organisasi, serta kompetisi. Fenomena serupa terjadi pada sejumlah permainan masyarakat di berbagai negara yang kemudian dikembangkan menjadi olahraga kompetitif dengan aturan dan penyelenggaraan yang lebih terstruktur.

Bagi Gardu Komunitas Wajo, penyelenggaraan turnamen di Kotamara memiliki dimensi yang lebih luas daripada pertandingan. Selain menyemarakkan Hari Jadi Kota Baubau, kegiatan ini diharapkan mempertemukan warga dari berbagai latar belakang, menggerakkan aktivitas ekonomi sekitar lokasi, dan membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM.

"Kami sebagai elemen masyarakat berkomitmen untuk terus kebersamai, mendukung langkah kerja pembangunan, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan Kota Baubau," tegas Rahmat.

Dengan target 256 pasangan, Turnamen Domino 2026 diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang memperkaya rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Baubau. Pertandingan pada 10-11 Oktober mendatang sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan momentum daerah melalui kompetisi, silaturahmi, dan kegiatan ekonomi lokal. (*)